

Paradigma Pendidikan Masa Depan (Wawancara dengan Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed)

Solicha

Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Edukasi.

Perbincangan tentang paradigma pendidikan agaknya kurang mendapat perhatian di kalangan masyarakat di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang tercabik-cabik dewasa ini. Apalagi bila perbincangan itu dihubungkan dengan masalah pendidikan agama di sekolah-sekolah. Mengingat pentingnya isu tersebut, Solicha dari Redaksi Jurnal Edukasi mencoba mewawancarai Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Hasil wawancara kami paparkan secara gamblang di bawah ini.

Kalau kita perhatikan perkembangan pendidikan kita secara kuantitas sangat pesat, tetapi dilihat dari segi kualitas masih sangat memprihatinkan:

Sebetulnya saya sendiri berpikir, bahwa banyak orang dan hampir semua orang mengeluh pen-

didikan kita mutunya rendah, semuanya rendah. Baik dari pengelolaan, metodologi, sumber daya manusia seperti guru dan kepala sekolah, materi yang diajarkan, maupun dana dan sebagainya orang mengeluh itu kurang. Sehingga mutunya rendah. Tapi ada satu hal yang mestinya kita bersyukur, yaitu bagaimanapun juga kita jelas mempunyai satu Sistem Pendidikan Nasional, sejak tahun 1950-an. Itu yang kurang disuarakan untuk disyukuri. Dibandingkan dengan misalnya Penyuluhan Pembangunan Nasional yang tidak dilegitimasi dalam satu undang-undang. Pertanian ada sistem penyuluhannya, demikian juga pajak. Semua ada sistem-sistem penyuluhannya. Tetapi yang terundang-undangkan baru Sistem Pendidikan Nasional.

Dari situ mestinya kita bersyukur, karena kita sudah punya Undang-undang. Dan sebagai konsekuensinya saya ingin semua pihak, kalau kita mengeluh, jengkel, sedih dan kalau kita mau berkontribusi bagi pendidikan nasional, mestinya tetap dalam bingkai undang-undang itu karena itu sudah kita perjuangkan. Dalam konteks logika seperti itu, saya ingin mengajak mari kita baca Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, mari kita sikapi dan siasati bagaimana kalau kita mau mengajukan konsep paradigma baru rambu-rambunya UU tersebut, sehingga pola pikir kita tertib. Ada 2 yang ingin saya tekankan di sini yaitu, *pertama*, semua keluhan, penderitaan dan kejengkelan yang disuarakan sebetulnya tidak pernah menyentuh kalau kita belum punya satu Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, UU No

20 tahun 2003 memang sudah jauh lebih baik dibanding UU No 2 tahun 1989.

Meskipun kita punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tetapi kegiatan pendidikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak konsisten dan kurang menjamah aspek kemanusiaan. Begitu juga dengan aplikasi dari UU No 2 tahun 1989.

Ada beberapa kelemahan dari UU No 2 tahun 1989 antara lain:

•>*Highly centralized* yang banyak dikeluhkan oleh semua orang. Kurikulum dari Senayan sampai ke Medan, atau Papua sama. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga pendidikan baik siswa guru maupun karyawan, persyaratan penerimaannya, tata cara kerja, bahkan pakaian dan jenjang kenaikan pangkatnya, penilaian hasil pendidikan dan sebagainya masih diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air.

•>*Adanya diskriminasi*. Dalam kenyataan ada direktorat swasta dan negeri yang menunjukkan diskriminatif. Padahal semua adalah anak bangsa. Adanya diskriminasi ini menunjukkan ketidakcocokan dengan makna hakekat pendidikan itu sendiri. Sikap pemerintah yang kemudian diikuti oleh masyarakat juga ikut mendiskriminasikan. Sulitnya mencari pekerjaan seringkali bukan karena tidak ada pekerjaan atau kurangnya usaha tetapi karena lembaga pendidikan tempatnya menempuh ilmu selama ini belum disamakan statusnya. Penilaian, pelayanan, anggaran dan sebagainya terhadap swasta ber-

beda jauh. Hanya beberapa swasta yang karena upayanya sendiri bangkit dan memperbaiki diri. Misalnya, lembaga pendidikan swasta yang dikelola kelompok Kristen, Islam atau kelompok profesional yang reputasinya lebih baik. Misalnya Sekolah Madania, Al-Izhar dsb. Tetapi semua itu hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Meskipun pada waktu itu sudah ada SKB Tiga Menteri di mana anak-anak yang berasal dari madrasah atau pesantren dapat melanjutkan ke fakultas umum sebagaimana anak SMU, sebaliknya anak sekolah umum dapat melanjutkan ke fakultas agama atau IAIN. Namun sistemnya belum diubah. Kurikulum dan teknik operasionalnya belum berubah. Sehingga tidak urung anak-anak yang berada di fakultas umum lebih banyak berasal dari SMU, sebaliknya anak-anak yang masuk ke fakultas agama lebih banyak dari madrasah dan pesantren. Jadi tidak berbeda dengan sebelumnya. Dan masih banyak kelemahan dari UU No. 2 tahun 1999.

Bagaimana dengan UU NO. 20 Tahun 2003.

UU No 20 tahun 2003, *pertama* menekankan adanya desentralisasi. *Kedua*, otonomisasi, tidak dikelola secara ketat oleh pusat. Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Namun, teknik operasionalnya belum tersedia. Karena adanya kelemahan yang luar biasa dari pengelola unit-unit pendidikan. Meskipun diberikan otoritas tapi kemampuan mandiri mereka belum kuat. Sementara pemberlakuan otonomi daerah sendiri masih banyak menimbulkan masalah.

Maksud pemberlakuan otonomi dan desentralisasi sebenarnya supaya mempercepat keputusan. Dengan desentralisasi antara pengambil keputusan, pelaksana yang harus melaksanakan keputusan dan *user* sebagai pengguna jasa pendidikan itu dekat jaraknya. Tetapi hal ini belum berlangsung secara baik. Apalagi masih baru karena belum ada Rencana Peraturan Pemerintah. Sementara kebutuhan untuk belajar cepat dan bermutu sudah sangat mendesak dan krusial. Kebutuhan ini sulit dibendung karena mereka butuh ilmu, cepat kerja dan sebagainya untuk merespon tantangan jaman. Belum ada keseimbangan antara kebutuhan akan kecakapan, berbagai kompetensi untuk memenuhi tuntutan kerja, dengan peningkatan kemampuan dan peluang yang ada.

Kalau mendengar penjelasan singkat Bapak tadi sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan diberlakukannya UU No 20 Tahun 2003 dibandingkan dengan UU sebelumnya.

Secara mendasar memang UU No 20 Tahun 2003 tidak berbeda dari UU sebelumnya, yaitu *pendidikan dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan, di bawah otorita administrasi birokrasi*. Saya mengusulkan, pendidikan dilakukan di bawah otorita akademik, karena pendidikan adalah kerja akademik, bukan kerja kekuasaan atau birokrasi. Sampai sekarang karier peningkatan dosen, pengangkatan guru atau tenaga akademik lainnya masih sama dengan ukuran karier pegawai lainnya. Mulai dari golongan, syarat kenaikan pangkat dan sebagainya. Hanya untuk guru dan dosen teru-

tama diberi embel-embel harus ada kum ilmiah. Tetapi perbedaan ini tidak mendasar. Jadi persis sama dengan peningkatan, pembinaan dan pemberhentian karier pegawai pada umumnya. Tidak berbeda antara menyelenggarakan kantor camat atau kelurahan dengan menyelenggarakan sekolah atau perguruan. Saya ingin menempatkan guru, dosen, mahasiswa sebagai civitas akademik. Untuk itu harus dipenuhi hak asasi akademiknya, *academic bill of right* harus diberikan. Contoh yang paling sederhana adalah sarana transportasi bagi anak sekolah. Di sini anak sekolah harus bersaing untuk mendapat tumpangan dengan penumpang yang lain. Menghadapi hal tersebut, para sopir angkot tidak peduli, bahkan mereka cenderung enggan membawa anak sekolah karena tarif mereka lebih murah. Sedangkan di sisi lain banyak orangtua yang tidak kuat untuk membayar lebih sebagaimana penumpang biasa. Hak asasi yang sederhana sekali belum terpenuhi. Sebaliknya pada sekolah swasta elit hal tersebut sangat diperhatikan. Contoh pada siswa SD Madania, setiap pagi siswa sudah tahu jadwal menu makan, kegiatan dsb. Perkembangan siswa, inovasi, kreativitas dan interaksi sosial secara mendetail juga dilaporkan dan ada *grade*-nya. Semua dalam Bahasa Inggris. Sekolah yang seperti ini mahal, hanya kelompok kecil yang bisa menikmatinya. Dan yang mendapatkan *better education* ini akan menjadi kelas tersendiri, yang nantinya akan menjadi pemimpin. Kelas ini pertumbuhan penduduknya lambat. Sebaliknya kelompok yang umum pertumbuhan penduduknya cepat. Sehingga *gap* makin besar.

Ada hal menarik ketika tahun 1945, Kaisar Jepang menerima tentara yang kalah perang. Pada saat itu para jenderal mengatakan bahwa prajurit Jepang telah mati-matian membela negara. Namun yang ditanyakan oleh Kaisar adalah ada berapa guru yang tewas. Menurut Kaisar lewat gurulah (pendidikan) Jepang akan bangkit kembali menjadi negara nomor 1. Dan menjadi kenyataan. Di negara manapun produk Jepang menjadi andalan.

Tony Blair juga dalam pidatonya menjadi Perdana Menteri mengatakan bahwa *I have Three burning issues* untuk membangun Inggris. *First, education, second: education, and third: education.* Jadi tidak ada lagi isu lain yang lebih penting selain pendidikan. Sedangkan di negara kita terbalik. Yang paling sering digembar-gemborkan oleh media massa adalah masalah politik, korupsi, perampokan, dll. Pendidikan hampir tidak pernah terdengar gaungnya.

Untuk menjembatani gap yang makin besar ini, solusi apa yang Bapak tawarkan?

Paradigma pendidikan harus diubah. Mengingat belajar itu mahal, saya mengusulkan seperti di luar negeri, ada *higher education* seperti SD, SMP, SMU dan tingkat perguruan tinggi dan ada *Further education* yaitu belajar terus maju ke depan (meningkat) sesuai dengan kebutuhan, seperti kursus-kursus, dsb. Peningkatan ini terus dihitung sertifikatnya, sehingga dengan kompetensi tertentu seseorang akan disamakan dengan tingkat pendidikan formal tertentu. Ini merupakan implikasi dari pendidikan ada-

lah kerja akademik. Sedangkan di negara kita ukuran kepegawaian masih dilihat dari ukuran kepegawaian. Bukan ukuran akademik. Kalau kerja akademik, kenaikan pangkat bukan berdasarkan waktu, atau loyalitas tetapi berdasarkan reputasi atau prestasi akademik. Untuk itu sistem harus dijungkirbalikkan. Pada perguruan tinggi misalnya, yang berada paling depan adalah ketua jurusan atau program studi bersama mahasiswa dan guru besar. Karena harga suatu perguruan tinggi disuarakan oleh karya-karya yang diproduksi oleh civitas akademik. Yang terjadi di negara kita yang paling depan adalah rektor. Tunjangan terbesar juga di rektor. Ketua program studi hampir tidak ada artinya. Mestinya rektor surut ke belakang untuk mem-*back up*. Kepentingannya untuk memajukan lembaga.

Bagaimana dengan pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan?

Ada fenomena berbalik arah di negara kita. Islam mestinya inklusif, kenyataannya makin terpinggirkan, eksklusif. Mestinya *rahmatan lil 'alamiin*, kenyataannya wawasannya sempit. Islam mestinya tangan di atas, tetapi kenyataan sebaliknya.

Pendidikan agama di sekolah masih merupakan pengajaran agama, normatif, dan terpisah-pisah (sporadis). Anak akan tahu tapi belum merasa memiliki. Padahal metodologi pengajaran itu terdiri dari tiga tahap, *pertama* dari tidak tahu menjadi tahu. Tahap ini tidak sukar, dalam waktu singkat orang dapat memperolehnya. *Kedua*, dari tahu menjadi merasa memiliki.

Tahapan ini sudah mulai sukar. Waktu yang diperlukan banyak dan upaya yang dilakukan memerlukan kecerdasan dan taktik yang hebat. Ketiga, pendidikan harus "**menjadi (menggapai makna)**" yaitu menjadikan dirinya sebagai pembelajar - *becoming learner* - lengkap dengan semangat mencari ilmu. Sekolah boleh selesai tetapi belajar tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, inti dari pembelajaran mestinya, *learn how to learn* sejak awal. Guru-guru pendidikan agama, atau para kyai mestinya lebih memperluas tafsirannya. Saya tidak mempunyai otorita di sini, tapi saya tidak malu menyatakannya. Misalnya tentang puasa. Tujuannya adalah supaya kita dapat merasakan bagaimana sulitnya orang tidak makan.

Ketika berbuka puasa, kita sama-sama berbuka. Bedanya dengan orang miskin, mereka mungkin berbuka dengan air putih dan sepotong singkong, tetapi pada pejabat, mereka makan dengan hidangan yang serba mewah lengkap dengan publikasi mass media. Perluasan makna dari kondisi tersebut yang sering terlupakan oleh para guru agama. Kalau sudah tidak puasa, makanan itu berarti lambang bahwa saya mampu untuk mengakses berbagai sumber. Makan apa saja bisa. Sedangkan pada orang miskin, yang memang kemiskinan struktural, meskipun tidak puasa mereka memang tidak mampu. Maksudnya, di dalam mengakses berbagai sumber, kita harus tahu bahwa ada orang miskin, bahwa rizki yang kita terima sebagian milik mereka, hanya mereka tidak punya kemampuan untuk mengaksesnya. Hal ini tidak pernah dibicarakan. Jadi pendidikan agama

masih di-treate, diperlakukan sebagai pengajaran dan bersifat eksklusif, tidak 100% + 100% menjadi 100%. Terpisah antara yang mempelajari dengan yang dipelajari. Belum ada tanggung jawab. Bukan pengajaran, atau pendidikan lagi, tetapi pembudayaan. Contoh: banyak ahli hukum tetapi melanggar hukum, dan sebagainya.

Mengamati sejarah perjalanan pendidikan Indonesia seperti yang telah Bapak sampaikan, terasa ada semacam kekeliruan paradigma yang kita gunakan selama ini sehingga perlu dicari paradigma baru yang lebih menyentuh aspek kemanusiaan. Bagaimana menurut Bapak?

Saya mencoba menawarkan dalam buku saya *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, yang tertuang dalam 13 butir-Naskah Akademik. Salah satu butir menyebutkan bahwa pendidikan satu. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah satu yaitu "memanusiakan manusia" atau mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga bersifat *theocentric*. Butir lain menyebutkan bahwa pendidikan adalah kerja akademik. Pendidikan diselenggarakan dan dikelola di bawah kekuasaan akademik, karena fokus pendidikan adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia, maka merupakan hak asasi anak didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan zamannya. Karena kerja akademik maka yang dikenal adalah sistem reputasi akademik, siapa yang berprestasi dialah yang menempati posisi dan peran penting. Serta perlunya *political will* dari pemerintah.